

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2014

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2014



ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi	6,0%
Inflasi	5,5%
Suku Bunga SPN 3 Bulan	5,5%
Nilai Tukar	Rp10.500,00/US\$
Harga Minyak ICP	US\$105/barel
Lifting Minyak	870 ribu barel/hari
Lifting Gas	1.240 ribu barel setara minyak per hari

APBN 2014

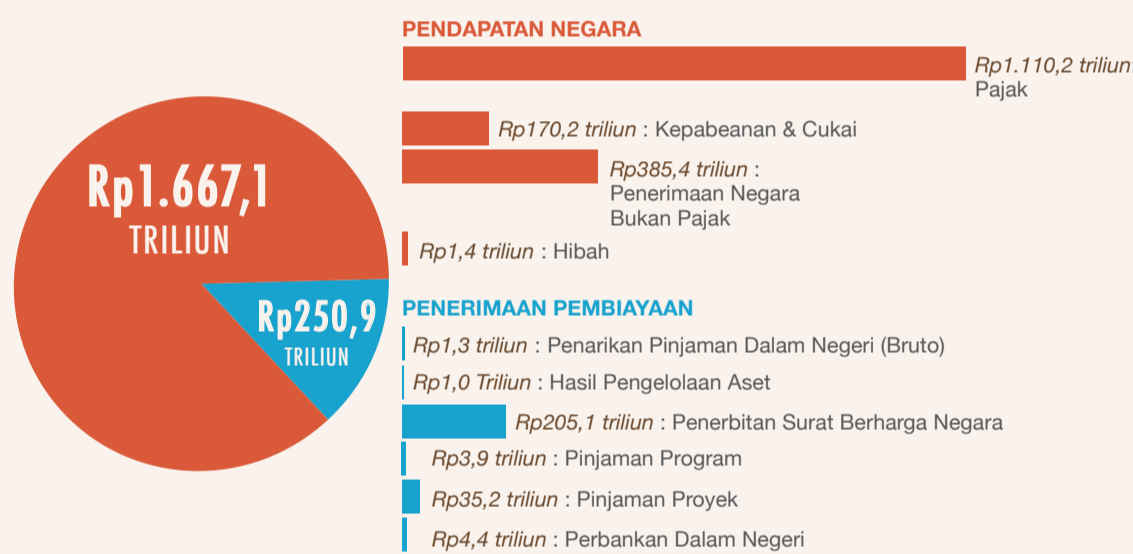
Strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal: mendorong agar APBN lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga keseimbangan dalam rangka memperkuat kapasitas dan daya tahan fiskal, namun tetap dikelola secara hati-hati.

- Mengendalikan Defisit Anggaran:
 - Optimalisasi pendapatan negara dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan;
 - Meningkatkan kualitas belanja melalui (i) meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur; (ii) pengendalian subsidi; dan (iii) efisiensi belanja barang (operasional & perjalanan dinas).
- Mengendalikan Keseimbangan Primer:
 - Optimalisasi pendapatan negara;
 - Memperbaiki struktur belanja melalui pembatasan belanja terkait, belanja mandatori, dan efisiensi subsidi untuk kualitas belanja.
- Menurunkan rasio utang terhadap PDB:
 - Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman;
 - Negative net flow;
 - Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas perekonomian.

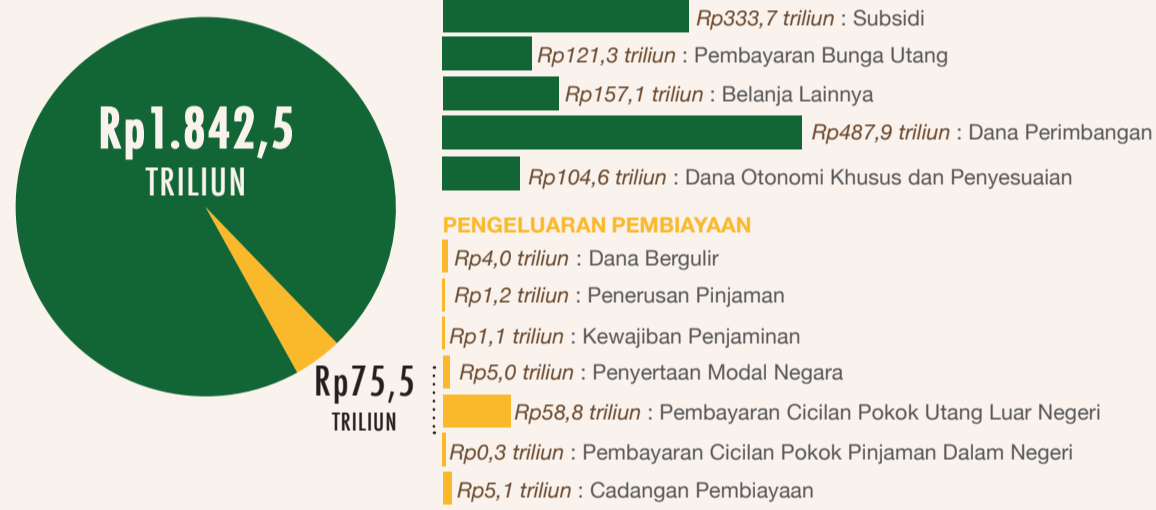
Arah Kebijakan Fiskal

Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif

Sumber-Sumber Penerimaan

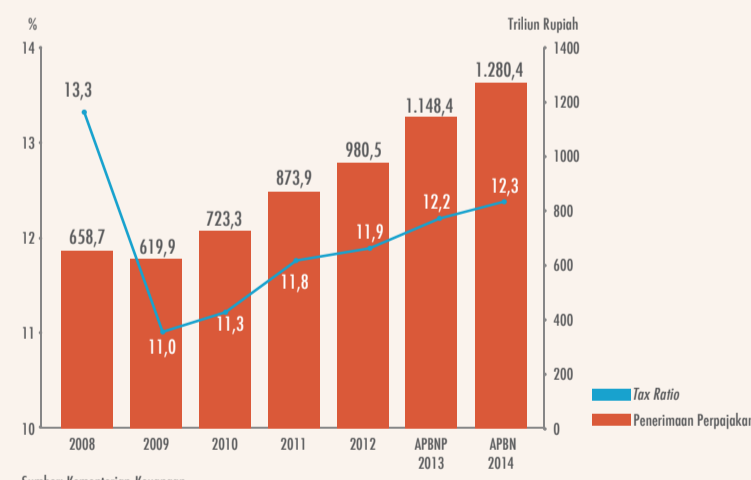


Kebutuhan Pengeluaran



PENDAPATAN NEGARA Rp1.667,1 triliun

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN



Kebijakan Insentif Perpajakan

tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha

- Penanaman modal bagi industri hilir pertambangan dan disinsentif bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah;
- Pengembangan industri *intermediate* dalam rangka substitusi impor, dalam bentuk pembebasan bea masuk dan *tax allowance*;
- Fasilitas PPhBM untuk Low Cost Green Car (LCGC).

- Penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak;
- Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar.

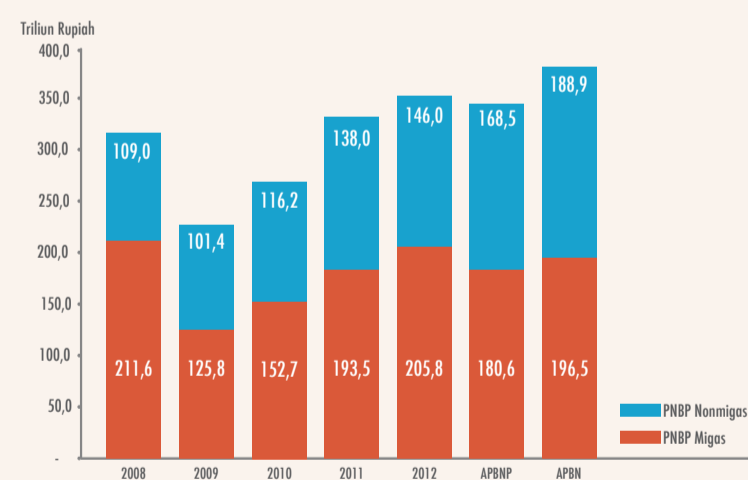
Langkah Optimalisasi Kepabeanan dan Cukai

- Mengantisipasi pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen terhadap impor bahan baku terkait kebijakan FTA;
- Ekstensifikasi Barang Kena Cukai; dan
- Penyesuaian tarif cukai minuman beralkohol.

Langkah Optimalisasi PNB

- Mengoptimalkan *lifting* Minyak dan Gas dengan didukung investasi di sektor Migas untuk peningkatan cadangan minyak Indonesia;
- Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara seimbang dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup;
- Penyesuaian tarif royalti dan penjualan hasil tambang untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi sebesar 13,5% (agar sama dengan PKP2B), sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR;

PERKEMBANGAN PNB



- Perbaikan kinerja BUMN untuk memberikan dukungan pada APBN melalui peningkatan dividen BUMN, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan belanja modal BUMN;
- Merevisi jenis dan tarif PNB pada K/L agar sesuai dengan kondisi aktual, serta optimalisasi pengelolaan dan pengawasan pemungutan PNB yang lebih baik.

PEMBIAYAAN Rp175,4 triliun

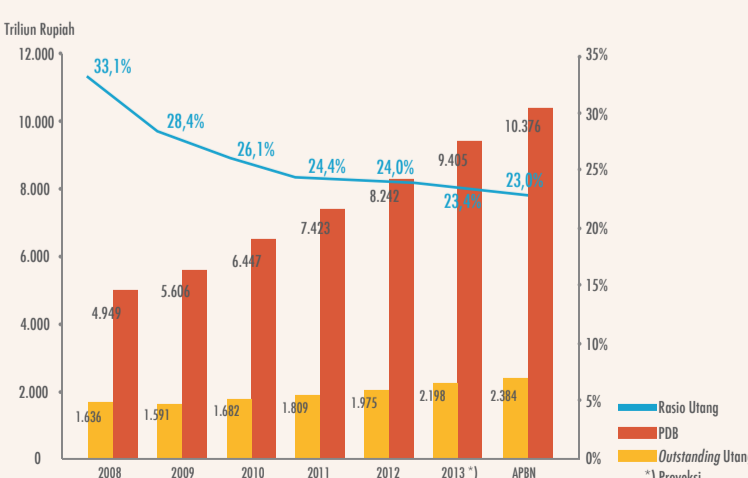
RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB

Seiring dengan kebutuhan dana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat, kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2014 direncanakan Rp175,4 T. Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri sebesar Rp196,3 T dan luar negeri sebesar negatif Rp20,9 T

Sumber pembiayaan APBN 2014 utamanya dari penerbitan Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan ke depan akan lebih mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri, sehingga bebas dari risiko nilai tukar.

Rasio utang Pemerintah terhadap PDB Indonesia relatif kecil dan diperkirakan sebesar 23,0 persen pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian negara.

- Pengeluaran pembiayaan antara lain guna mendukung pembangunan infrastruktur yaitu:
- Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigraya Finansial dan Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia;
 - Dana bergulir kepada LPDB KUMKM dan Pusat Pembiayaan Perumahan; serta
 - Kewajiban Penjaminan.



Menteri Keuangan Republik Indonesia

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2014

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2014

BELANJA NEGARA Rp1.842,5 triliun

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Rp1.249,9 triliun

Pembangunan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp84,1 triliun
- Kementerian Perhubungan: Rp40,4 triliun

Infrastruktur Perhubungan: mendukung Keterhubungan Antar Wilayah

- Peningkatan kapasitas jalan sepanjang 3.854 km;
- Pembangunan 98,1 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 66 unit lokomotif, Kereta Rel Diesel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), tram, dan railbus;
- Pembangunan 20 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara;
- Pembangunan prasarana 60 dermaga penyeberangan.

*Kementerian Pekerjaan Umum juga memiliki tugas dan fungsi terkait infrastruktur sumber daya air dan permukiman

Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

- Belanja K/L Rp130,3 triliun
- Kemendikbud: Rp80,7 triliun
- Kemeng: Rp42,6 triliun
- K/L lainnya: Rp7,1 triliun
- Transfer ke Daerah Rp238,6 triliun

Pendidikan Murah, Terjangkau, dan Berkualitas Rp368,9 T

- Perluasan jangkauan pemerataan pendidikan, antara lain dengan:
 - Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi 30,5 juta siswa SD/SDLB/MI/UiA dan 14,1 juta siswa SMP/SMP/MTs/WiUstha;
 - Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, melalui: (a) penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 9,8 juta siswa SMA/MA/SMK; dan (b) pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas rusak;
 - Menyediakan bantuan bagi sekitar 9,5 juta siswa miskin SD/SDLB/MI, 3,8 juta siswa miskin SMP/SMP/MTs, 2,1 juta siswa miskin SMA/SMK/MA dan sekitar 200 ribu mahasiswa kurang mampu penerima Bidik Misi.

- Peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui:
 - Memastikan perbandingan antara guru dengan murid sebesar 1:32 (SD & MI) dan 1:40 (SMP & MTs);
 - Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara lain dengan Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan;
 - Penyediaan dana tunjangan profesi guru: Rp60,5 T.

"Keep Buying Strategy"

- Untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik;
- Untuk memberikan perlindungan kepada rakyat terutama di masa krisis;
- Saat ini Pemerintah sedang merumuskan "Keep Buying Strategy" dengan menyiapkan paket stimulus, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- Upaya ekstra juga dilakukan untuk mengendalikan inflasi, agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Kementerian Pertanian: Rp15,5 triliun

Kementerian Kelautan & Perikanan: Rp6,5 triliun

Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik

Komisi Pemilihan Umum: Rp15,4 triliun

Badan Pengawas Pemilu: Rp3,3 triliun

Mendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 yang Lancar, Demokratis, dan Aman

- Dukungan tahapan Pemilu 2014 termasuk pemutakhiran data pemilih, dan pengawasannya;
- Pendidikan politik/pemilih termasuk orang miskin, pemuda, perempuan dan penyandang cacat;
- Peningkatan pengawasan Pemilu yang partisipatif;
- Pengamanan Pemilu.

Kementerian ESDM: Rp16,3 triliun

Infrastruktur Energi dan Lainnya: Menunjang Ketahanan Energi

- Peningkatan kapasitas hingga 164 megawatt; pembangunan transmisi sekitar 4.881 km; gardu induk 1.020 MVA, dan gardu distribusi 136,72 MVA;
- Penambahan jaringan gas pada empat kota;
- Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai sekitar 81,4%.

Kementerian Dalam Negeri: Rp14,9 triliun

Kementerian Sosial: Rp7,7 triliun

Kementerian Koperasi & UKM: Rp1,6 triliun

Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan

- Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 - Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat;
 - Klaster III : Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro; dan
 - Klaster IV : Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/Sarana Murah.

Sasaran utama tahun 2014 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9-10,5%, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang meliputi:

- Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp5,5 triliun, berupa bantuan tunai bersyarat untuk sekitar 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat pemeriksaan kesehatan dan memenuhi tingkat kehadiran pendidikan bagi anggota keluarganya;
- Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), antara lain meliputi:
 - PNPM Perdesaan sebesar Rp9,3 triliun bagi 5.260 kecamatan; dan
 - PNPM Perkotaan sebesar Rp2,0 triliun bagi 11.066 kelurahan.

Ketahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

- Peningkatan produksi padi sebesar 6,25% (menjadi sebesar 76,6 juta ton GKGI);
- Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya, yaitu: jagung dengan target pertumbuhan produksi sebesar 10,0%; kedelai (20,0%); tebu (12,6%); dan daging sapi (7,3%);
- Peningkatan produksi perikanan menjadi 22,4 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,9 juta ton; dan
- Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang diukur melalui indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di atas 105.
- Terlaksananya rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan operasi dan pemeliharaan pada areal seluas 3.023,8 ribu ha.

Kementerian Perhubungan: Rp86,4 triliun

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

- Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 28%; matra darat (25%), matra laut (21%), dan matra udara (32%);
- Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan Alutsista hasil produksi industri dalam negeri mencapai 25%.

Kementerian Perumahan Rakyat: Rp4,6 triliun

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

- Pembangunan 100 *twin block* rusunawa serta penyediaan fasilitas dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 38.179 unit.

Kementerian Kesehatan: Rp46,5 triliun

Badan POM: Rp1,1 triliun

Kesehatan Murah untuk Masyarakat

- Mencapai persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan hingga mencapai 80,1%;
- Meningkatkan persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap hingga mencapai 90%;
- Meningkatkan jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawat di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk sebanyak 96 puskesmas;
- Meningkatkan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih hingga mencapai 90%;
- Anggaran untuk pelaksanaan SJSN bidang kesehatan:
 - Penambahan sebanyak 4.145 tempat tidur (TT) di kelas III Rumah Sakit Pemerintah dalam rangka peningkatan upaya kesehatan rujukan.
 - Pengalokasian anggaran untuk iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu orang miskin dan tidak mampu sebanyak 86,4 juta jiwa dalam rangka pelaksanaan SJSN Kesehatan.

Kepolisian: Rp45,0 triliun

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

- Pemertanian rasio Ideal Polisi terhadap masyarakat 1:575;
- Pemenuhan alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap mencapai 41%.

TRANSFER KE DAERAH

Rp592,6 triliun

Kebijakan Transfer ke Daerah

- Kebijakan Transfer ke Daerah, antara lain:
- Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah;
 - Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
 - Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

Dana Perimbangan

Rp487,9 triliun, terdiri atas:

- DBH Rp113,7 T dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- DAU Rp341,2 T dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah;
- DAK Rp33,0 T dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp104,6 triliun, terdiri atas:

- Dana Otonomi Khusus Rp16,1 T, dibagi untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, termasuk dana tambahan Otus Infrastruktur Rp2,5 T, untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dana tambahan Otus Infrastruktur digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp523,9 miliar, dialokasikan untuk penyalenggaraan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dana Penyesuaian Rp87,9 T, dialokasikan antara lain untuk:
 - Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - Dana Insentif Daerah (DID) diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Informasi lebih lanjut: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
www.kemkeu.go.id | email: infoapbn@depkeu.go.id